



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
WEB SEMINAR BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN DPR RI “PERAN
PARLEMEN DALAM PENGAWASAN ANGGARAN RESPON COVID-19”**

Tahun sidang : 2019 – 2020
Masa persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Konsultasi
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juli 2020
Pukul : 15.00 – 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Biro KSAP, Lt. 2, Gedung Nusantara III, DPR RI

Acara : Web Seminar Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI “Peran Parlemen Dalam Pengawasan Anggaran Respon Covid-19”

Ketua Rapat : Dr. Fadli Zon

Moderator : Anthony Smith (Chief Executive/Director WFD)

Hadir :

A. NARASUMBER

1. Dr. Fadli Zon (Ketua BKSAP/F-Gerindra)
2. Puteri Anetta Komarudin (Anggota BKSAP/Komisi XI/ F-Golkar)
3. James Wild (Anggota Parlemen Inggris)
4. Geordin Gwyn Hill-Lewis (Anggota Parlemen Afrika Selatan)
5. Inaya Ezeedine (Anggota Parlemen Lebanon)

B. ANGGOTA DPR RI

1. Pimpinan

Dr. Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- a. Johan Budi S. Pribowo
- b. Sihar P.H. Sitorus
- c. Irine Yusiana Roba Putri

3. Partai Golongan Karya

- a. Putri Anetta Komaruddin
- b. Dyah Roro Esti M.Sc.

4. **Partai Gerakan Indonesia Raya**
 - a. Himmatul Aliyah, M.Si.
 - b. Rachel Maryam
5. **Partai Nasional Demokrat**
 - a. Muhammad Farhan
6. **Partai Kebangkitan Bangsa**
 - a. Andi Muawiyah Ramly
7. **Partai Demokrat**
 - a. Lasmi Indaryani, SE.
8. **Partai Keadilan Sejahtera**
 - a. Surahman Hidayat
9. **Partai Amanat Nasional**
 - a. Ir. Andi Yuliani Paris
10. **Partai Persatuan Pembangunan**
 - a. Emma Umriyatul Chusnah

C. BIRO KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

1. Endah T.D. Retnoastuti
2. Chairil Patria, S.IP., M.Si.
3. Haryanti, S.A.B., M.A.P.
4. Miranti Widiani, S.Sos., M.Si.
5. Iis Anisa, S.E.
6. Renaldi Setiawan, S.I.P.
7. Hery Prasetyo.
8. Miftahudin
9. Yudi Prawira

D. TENAGA AHLI BKSAP

10. Dewi Amelia Tresna Wija
11. Heriyono Adi Anggoro

I. PEMBUKAAN

1. Virtual Webinar dibuka oleh Ketua BKSAP DPR RI , Dr. Fadli Zon pada pukul 15.00 WIB.
2. Virtual Webinar dipimpin oleh Anthony Smith (CEO WFD) sebagai moderator

II. PRESENTASI PANELIS

1. Ketua BKSAP menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menegaskan dalam masa pandemi, peran pengawasan dan penggunaan anggaran DPR RI untuk menghadapi dampak krisis sangat krusial.
 - b. Mengungkapkan bahwa peningkatan dana yang digelontorkan dan defisit anggaran membuka ruang penyalahgunaan dan korupsi.
 - c. Parlemen memiliki tantangan dalam hal mekanisme kerja selama krisis dan juga tantangan dalam berkurangnya peran parlemen saat pemerintah menggunakan kuasa darurat-nya.

Paparan Panelis

1. Putri Komaruddin anggota BKSAP DPR RI menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat dua hal yang perlu dipastikan oleh Parlemen. Parlemen harus memastikan tidak ada perjanjian atau kartel untuk mengatur harga dan memastikan kualitas alat kesehatan berstandar WHO dalam pengadaannya.
 - b. Komisi Keuangan, Perbankan dan Non-Bank (Komisi XI), saat ini tengah fokus pada peningkatan pengawasan keuangan dan memastikan pencapaian tepat sasaran.
2. James Wild, anggota Komite Akuntabilitas Parlemen DPR Inggris menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyatakan di Parlemen Inggris, Komisi Akuntabilitas DPR-nya, mendorong kerja pengawasan secara terpadu dengan melibatkan pula pimpinan komisi kesehatan dan juga bisnis sebagai anggota Komisi Akuntabilitas agar dapat menginterogasi para pejabat senior pemerintahan.
 - b. Para anggota parlemen fokus pada efektifitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran terkait permasalahan Covid-19.
3. Geordin Gwyn Hill-Lewis, anggota Parlemen Afrika Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terlambatnya peran parlemen, termasuk di Afrika Selatan dalam masa awal krisis masih dapat dipahami. Terlebih ketika pemerintah membutuhkan respon lebih cepat untuk mengeluarkan kebijakan tanpa persetujuan parlemen.

- b. Kebijakan darurat ini harus diawasi karena kekuasaan tanpa pengawasan legislatif berbahaya.
4. Inaya Ezzeddine, anggota Parlemen Lebanon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Fungsi parlemen tidak berhenti meskipun kantor parlemen mengalami karantina. Sejumlah komisi termasuk Komisi Kesehatan aktif melakukan pertemuan pengawasan di Kantor Kementerian secara regular.
 - b. Mendorong kebijakan respon krisis se-inklusif mungkin dan sensitif gender.

III. KESIMPULAN

Mekanisme pengawasan anggaran di berbagai parlemen berbeda-beda, seperti:

1. Metode dan tata kerja di beberapa parlemen di saat pandemi Covid-19:
 - a. Parlemen Lebanon telah dibuka dua bulan lalu dan mengadakan beberapa kegiatan terbatas, disertai oleh protokol kesehatan yang ketat.
 - b. Parlemen Inggris telah mengadakan kegiatan kembali sejak sebulan yang lalu setelah sebelumnya menggunakan media *Zoom* dalam melakukan kegiatannya. Sebagai prosedur keselamatan, maka anggota yang diizinkan hanya 50 dalam satu waktu.
 - c. Parlemen Afrika Selatan hanya bersidang sekali dalam seminggu dan hanya bagi anggota yang sedang berada di Cape Town. Anggota selain itu menggunakan media online untuk bergabung dalam sidang parlemen.
 - d. Parlemen Indonesia telah bersidang kembali hingga minggu kedua Juli dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Sebagian besar masih melaksanakan kegiatan secara virtual.
2. Mekanisme dan aspek pengawasan anggaran:
 - a. Parlemen Inggris fokus pada pengawasan anggaran terkait Covid-19. Pemerintah Inggris telah mengalokasikan anggaran sebesar 100 Milyar Pound dan parlemen wajib untuk mengawasi peruntukannya.
 - b. Parlemen Indonesia di tengah keterbatasan, tetap melaksanakan fungsi pengawasan anggaran terkait COVID-19, tentu saja difasilitasi oleh teknologi informasi. Parlemen tetap menjaga komunikasi dengan pemerintah terkait permasalahan moneter dan fiskal di tengah pasar yang bergejolak.

- c. Di tengah keterbatasan, parlemen membatasi komunikasi dengan pemerintah. Di saat bersamaan pemerintah mengambil langkah-langkah darurat tanpa komunikasi yang memadai dengan parlemen. Di sinilah parlemen harus memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang besar yang mereka miliki.
 - d. Parlemen Lebanon secara berkala setiap 10 hari sekali menemui perwakilan Kementerian Kesehatan mengenai info terbaru terkait COVID-19. Parlemen juga telah menyetujui anggaran terkait pendanaan industri kecil dan pertanian.
3. Kesenjangan dan COVID-19
- a. Afrika Selatan merupakan negara yang tinggi tingkat kesenjangannya. Pertama kalinya dalam dekade ini Afrika Selatan mengalami peningkatan kesenjangan yang sangat tinggi yang ditandai oleh kelaparan dan malnutrisi dimana kebijakan *lockdown* memperburuk situasi ini.
 - b. Parlemen Inggris fokus pada tingkat penyebaran wabah dan kematian.
 - c. Putri menyatakan bahwa memperkuat peran perempuan merupakan salah satu solusi dalam penanganan Covid-19. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penguatan kesetaraan gender. Untuk mencegah Krisis ekonomi berkepanjangan pemerintah harus mendorong konsumsi dan menyediakan stimulus ekonomi.
4. Transparansi
- a. Afrika Selatan memiliki sistem yang memastikan proses penyiapan anggaran yang terbuka.
 - b. Parlemen Lebanon sukses menghasilkan Regulasi mengenai pembentukan Komisi Anti Korupsi.
 - c. Parlemen Inggris memastikan agar anggaran terkait Covid-19 dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
 - d. Komisi XI DPR RI telah membangun kerja sama yang baik dengan Komite Stabilitas Sistem Financial, yang terdiri atas Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan lembaga terkait lainnya untuk memantau kondisi keuangan nasional.

- e. Komisi XI DPR RI harus memastikan agar tidak terdapat kartel, atau permainan harga dalam proses pengadaan.
- f. Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan audit yang lebih menyeluruh dan mendalam karena potensi penyalahgunaan yang cukup besar.

5. *Lesson Learned*

- a. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi parlemen Inggris dalam upaya untuk mengawasi pemerintah. Di masa depan diharapkan pemerintah dapat menyediakan laporan yang memadai untuk membantu parlemen menjalankan tugasnya secara lebih baik.
- b. Parlemen Lebanon telah melakukan berbagai hal untuk memastikan berbagai sektor tidak diabaikan oleh pemerintah. Mendorong pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan memanfaatkan teknologi informasi dalam menghadapi tantangan.
- c. Melakukan fungsi pengawasan merupakan hal yang sulit akibat keterbatasan ruang gerak. Walaupun begitu, Komisi XI telah menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah dan Bank Sentral.
- d. Komisi XI DPR RI juga mendesak pemerintah untuk menciptakan seperangkat regulasi yang kohesif dan menyeluruh. Serta memiliki perencanaan yang matang untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat



Chairil Patria, S.IP., M.Si.
NIP. 197111051998031002